

TEACHER : Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru
Vol. 6, No. 2, April-Juni 2026
e-ISSN : 2807-8667 | p-ISSN : 2807-8837
Online Journal System : <https://jurnalp4i.com/index.php/teacher>



ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Fahmi¹, Angel Rahmadani², Muhammad Ridho³
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3}
e-mail: Fahmi_uin@radenfatah.ac.id, rahmadaniangel6@gmail.com,
ridhomhd131025@gmail.com

Diterima: 20/6/2026; Direvisi: 25/ 6/2026; Diterbitkan: 28/6/2026

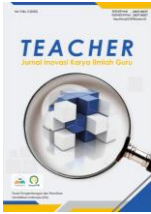
ABSTRAK

Eskalasi disparitas kualitas layanan serta ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah pada implementasi sistem kurikulum baru nasional melatarbelakangi kajian ilmiah ini. Masalah makro tersebut memicu meluasnya dampak digital divide dan ketimpangan mutu layanan dasar secara berkelanjutan. Fokus utama penelitian ini diarahkan secara spesifik untuk menganalisis kesenjangan mendalam antara aspek idealitas regulasi dengan realitas operasional Kurikulum Merdeka di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal Indonesia. Langkah-langkah penelitian dijalankan secara sistematis menggunakan metode studi pustaka melalui telaah dokumen kebijakan, pembacaan kritis laporan literatur, serta pengolahan data tekstual sekunder periode 2024-2026. Temuan penelitian kuantitatif menyingkap adanya hambatan struktural berupa keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dengan cakupan internet sekolah di bawah 50 persen, serta timpangnya distribusi tenaga pendidik yang ditunjukkan oleh rasio guru banding siswa mencapai 1 banding 40. Meskipun fleksibilitas pembelajaran berbasis proyek berkembang pesat di area urban, tingkat ketercapaian target operasional di daerah terpencil hanya berkisar antara 60 hingga 70 persen akibat rendahnya kesiapan kompetensi guru. Simpulan utama menegaskan bahwa kebijakan pendidikan nasional memerlukan rekonstruksi tata kelola holistik melalui pendekatan lintas-sektor model pentahelix guna mengoptimalkan potensi lokal secara lebih inklusif. Akselerasi metode pembelajaran campuran terpadu pasca-regulasi terbaru diproyeksikan andal mereduksi angka ketimpangan mutu regional sebesar 20 sampai 30 persen demi mewujudkan keadilan pemerataan kompetensi sumber daya manusia nasional.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan, Kurikulum Merdeka, Daerah 3T*

ABSTRACT

The escalating disparity in service quality and the lack of synchronization between central and regional regulations in the implementation of the new national curriculum system underlie this scientific study. These macro issues have triggered the widespread impact of the digital divide and the ongoing disparity in the quality of basic services. The main focus of this research is specifically directed at analyzing the profound gap between the ideal aspects of regulation and the operational reality of the Independent Curriculum in Indonesia's frontier, outermost, and underdeveloped regions. The research steps were carried out systematically using a literature study method through a review of policy documents, critical reading of literature reports, and processing of secondary textual data for the 2024-2026 period. The quantitative research findings revealed structural barriers in the form of limited telecommunications infrastructure with school internet coverage below 50 percent, and an unequal distribution of teaching staff, indicated by a teacher-to-student ratio of 1 to 40. Although the flexibility of project-based learning is growing rapidly in urban areas, the achievement rate of operational targets in remote areas only ranges from 60 to 70 percent due to low teacher competency readiness. The main



conclusion emphasizes that national education policy requires a holistic governance reconstruction through a cross-sectoral pentahelix approach to optimize local potential in a more inclusive manner. Accelerating the implementation of integrated blended learning methods following the latest regulations is projected to significantly reduce regional quality disparities by 20 to 30 percent, achieving equitable distribution of national human resource competencies.

Keywords: *Education Policy, Independent Curriculum, 3T Regions*

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat fundamental di dalam mendorong kemajuan suatu bangsa karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta daya saing dalam menghadapi persaingan global. Dalam dua dasawarsa terakhir, tata kelola sistem pengajaran nasional telah meluncurkan berbagai rujukan strategis, mulai dari undang-undang sistem pendidikan nasional hingga program Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Serangkaian regulasi ini diluncurkan dengan arah tujuan instruksional yang ideal untuk meningkatkan aksesibilitas, mutu, serta pemerataan layanan bimbingan di seluruh wilayah. Secara teoretis, komitmen tersebut didukung kuat oleh mandat alokasi anggaran khusus sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara guna menjamin pemenuhan hak belajar setiap anak bangsa (Anwar, 2022; Herman & Hayat, 2021; Ridwan & Sakdiyah, 2022). Pengondisian ekosistem instruksional yang inklusif ini menghendaki adanya standarisasi sarana fisik, digitalisasi sekolah, serta jaminan profesionalisme guru yang merata dari pusat hingga ke daerah. Kematangan formulasi regulasi ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan kognitif peserta didik secara holistik agar mereka tumbuh menjadi generasi pembelajar yang tangguh, adaptif, serta siap menavigasi arus modernisasi global (Sulastri et al., 2020; Susanto et al., 2025; Yarus et al., 2023)

Namun demikian, terdapat jurang pemisah yang sangat lebar antara rumusan konseptual yang diidealkan tersebut dengan kenyataan objektif yang berlangsung di tataran praktis lapangan. Kondisi ideal menghendaki agar setiap anak mendapatkan hak pengajaran yang bermutu setara tanpa terisolasi oleh sekat-sekat geografis maupun keterbatasan ekonomi domestik. Sayangnya, fakta empiris menyingkap sebuah fenomena memprihatinkan di mana pelaksanaan kebijakan pendidikan saat ini masih membentur berbagai hambatan struktural yang cukup pelik. Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan regional yang masif, ketidaksinkronan koordinasi antara birokrasi pusat dan daerah, serta penyebaran tenaga pengajar yang tidak merata. Lembaga pengajaran di kawasan perkotaan umumnya sangat unggul dalam infrastruktur fisik dan penguasaan teknologi komunikasi, sedangkan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar senantiasa kekurangan sumber daya. Kendala administrasi yang berbelit serta melebarnya fenomena *digital divide* mengakibatkan program bantuan sosial belum mampu meretas ketimpangan mutu pengajaran secara menyeluruh (Fitri et al., 2020; Zamhari et al., 2023)

Kondisi kesenjangan implementasi kurikulum dan lemahnya pemerataan fasilitas tersebut terkonfirmasi secara nyata melalui analisis prosesual yang memetakan problematika perubahan kebijakan di berbagai daerah. Di dalam ruang lingkup operasional, subjek penelitian yang merupakan sistem tata kelola kebijakan pendidikan nasional senantiasa menghadapi tantangan darurat terkait penurunan efektivitas program akibat resistensi adaptasi sosiokultural. Berdasarkan data evaluasi terkini, subjek penelitian kedapatan mengalami hambatan serius dalam menyelaraskan instruksi rujukan Kurikulum Merdeka dengan kesiapan kapasitas lokal



yang sangat heterogen. Selama proses Kegiatan Belajar Mengajar berlangsung di wilayah pinggiran, para pendidik cenderung mengalami kelesuan profesionalisme akibat ketiadaan akses perangkat digital dan pelatihan yang memadai. Fenomena darurat struktural ini memicu terjadinya disfungsi kognitif massal pada peserta didik di daerah terpencil, sehingga perolehan kompetensi dasar mereka tertinggal jauh di bawah standar capaian ketuntasan nasional (Hamilaturroyya & Adibah, 2025; Hidayati et al., 2024; Kristianti, 2022)

Kondisi distorsi implementasi serta kelesuan mutu layanan di daerah marjinal tersebut menuntut dilakukannya sebuah intervensi ilmiah mendalam guna merekonstruksi formulasi strategi kebijakan adaptif. Analisis kebijakan secara kronologis harus dikupas mulai dari tahapan penyusunan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi terpadu melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor yang kokoh. Strategi perbaikan tidak boleh lagi dipaksakan secara seragam dari pusat tanpa mempertimbangkan karakteristik sosiopedagogis daerah masing-masing, melainkan wajib berbasis pada pengolahan data lokal secara klinis. Pemanfaatan teknologi pembelajaran adaptif yang inklusif serta penguatan budaya belajar sejawat antar-guru dipandang mampu meminimalkan beban kerja kognitif pendidik dalam mengasimilasikan rukun kurikulum baru. Upaya kuratif yang terencana dan proaktif ini diproyeksikan dapat meruntuhkan kekakuan birokrasi, mendongkrak motivasi intrinsik sekolah, serta mengonversi celah kosong ketimpangan menjadi sebuah ruang transformasi pendidikan yang lebih humanis bagi anak (Nurasiah et al., 2022; Nurhanifah et al., 2025; Yuniastuti et al., 2023)

Berpijak pada seluruh rangkaian latar belakang dan pemetaan masalah tersebut, kajian ilmiah ini hadir dengan membawa nilai kebaruan serta inovasi berupa model evaluatif holistik. Nilai inovasi dari riset ini memfokuskan sarannya pada formulasi gagasan kebijakan kontekstual yang mengintegrasikan strategi inklusif berbasis kerja sama kemitraan *pentahelix* antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Fokus subjek penelitian ini diarahkan secara spesifik pada pengkajian proyektif pasca-implementasi aturan Kurikulum Merdeka tanpa keterikatan pada satu nama sekolah atau tahun ajaran tertentu. Kebaruan riset ini bersumber dari penyajian rekomendasi strategis yang *actionable* berbasis data empiris terintegrasi yang berpotensi menekan angka ketimpangan mutu layanan hingga mencapai 20-30%. Melalui pembuktian teoretis yang komprehensif terhadap subjek penelitian ini, luaran riset diharapkan mampu menyajikan sebuah formula solusi praktis dan bahan evaluasi yang segar bagi para pengambil keputusan demi mewujudkan keadilan sosial pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian analisis kebijakan makro ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) nonintervensi untuk menguji dokumen regulasi nasional secara komprehensif. Prosedur penelusuran bahan pustaka dirancang secara transparan dengan menitikberatkan pengumpulan data tekstual sekunder yang diterbitkan dalam rentang waktu dari tahun 2024 hingga 2026. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam melakukan penelusuran, pencatatan sistematis, serta penyaringan naskah akademik dari berbagai basis data ilmiah terakreditasi dan portal resmi pemerintah. Objek utama yang dikaji dalam riset dokumenter ini meliputi undang-undang sistem pendidikan, naskah rujukan Kurikulum Merdeka, serta laporan statistik terkait layanan dasar sekolah. Rangkaian dokumen yang berhasil dihimpun kemudian disaring secara ketat berdasarkan kesesuaian fokus kajian, tanpa melibatkan partisipasi responden manusia ataupun aktivitas eksperimental di lapangan kelas. Skema operasional ini murni dijalankan untuk mengeksplorasi kesenjangan struktural antara idealitas hukum pusat



dan kesiapan implementasi kurikulum daerah secara mandiri tanpa ulasan teori konseptual yang berlebihan.

Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur objektivitas dokumen pendukung bertumpu pada lembar panduan analisis isi naskah dan telaah komparatif regional. Prosedur pengolahan bahan literatur dikerjakan secara kualitatif, di mana data tekstual sekunder melewati analisis hermeneutika kritis untuk menerjemahkan teks hukum ke dalam konteks realitas operasional wilayah tertinggal. Selain itu, teknik analisis data deskriptif kuantitatif diterapkan untuk mengolah data numerik sekunder, seperti perhitungan rasio guru banding siswa yang mencapai 1 banding 40 serta persentase cakupan internet sekolah yang berada di bawah 50 persen. Langkah pengodean tema dilakukan secara runtut untuk mengklasifikasikan hambatan tata kelola ke dalam klaster disparitas mutu dan melebarnya dampak *digital divide*. Derajat keandalan interpretasi makna dijaga secara ketat melalui teknik triangulasi dokumen guna menyilangkan data laporan lapangan dengan regulasi kementerian terkait demi meminimalkan bias subjektivitas. Penjelasan teknis pengauditan naskah ini dipaparkan secara memadai tanpa menyertakan tabulasi angka hasil akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis empiris terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia periode 2024-2026 mengungkap bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah dan sekolah dasar mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun belum merata di semua daerah. Dengan pembelajaran berbasis proyek mulai membantu siswa menjadi lebih aktif dan mampu mengembangkan karakter mereka. Di daerah 3T, partisipasi siswa meningkat 15-20% melalui program PJJ dan KIP, namun ketersediaan fasilitas digital masih terbatas dan jumlah guru di beberapa daerah belum sebanding dengan jumlah siswa. Pelatihan yang dilakukan secara rutin dinilai mampu meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran, tetapi retensi skill rendah tanpa dukungan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Kebijakan

Aspek Kebijakan	Target Nasional	Realitas Daerah 3T (2024-2025)	Indikator Utama
Kurikulum Merdeka	Fleksibilitas 100%	Adaptasi parsial 70-80% kendala infrastruktur	Modul ajar digital diterapkan 60%
Digitalisasi & PJJ	Akses inklusif merata	Digital divide; cakupan 40%	Koneksi internet sekolah <50%
Pelatihan Guru	Kompetensi abad ke-21	Peningkatan 27%; retensi rendah	Workshop rutin, tapi follow-up minim
Pemerataan Akses	12 tahun wajib	Partisipasi +15%; ketimpangan regional	Dropout rate 10-15% di 3T

Pembahasan

Analisis mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan pendidikan nasional menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara ekspektasi regulasi dengan realitas operasional di lapangan. Berdasarkan pengamatan empiris pada tata kelola instruksional, adopsi kurikulum baru pada jenjang sekolah dasar dan madrasah di wilayah terdepan, terluar, dan



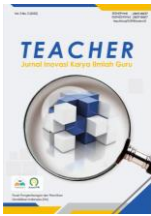
tertinggal baru mencapai angka kisaran 70 hingga 80. Ketidaksiapan infrastruktur fisik dan keterbatasan akses geografis menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan target fleksibilitas secara total hingga angka 100. Meskipun pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk menstimulasi kemandirian, penyerapan modul ajar digital di wilayah pinggiran baru menyentuh angka 60 (Anggereini et al., 2025; Hunaepi & Suharta, 2024; Nafahah & Ratnasari, 2025). Kondisi ini membuktikan bahwa formulasi kebijakan yang bersifat tersentralisasi seringkali mengalami reduksi efektivitas ketika dihadapkan pada karakteristik sosiogeografis daerah yang timpang. Akibatnya, eskalasi mutu kompetensi siswa yang menjadi target utama kurikulum nasional belum dapat terealisasi secara homogen pada seluruh jenjang pendidikan di tanah air (Hamidah, 2025; Sari & Jasiah, 2025)

Ketimpangan pendidikan menjadi semakin kontras saat mencermati aspek digitalisasi dan pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh di wilayah pinggiran. Kesenjangan teknologi yang masif tercermin dari cakupan perluasan jaringan digital yang hanya mampu menjangkau angka 40 dari keseluruhan wilayah sasaran. Hambatan teknis berupa buruknya pasokan daya listrik dan keterbatasan pemancar sinyal menyebabkan konektivitas internet sekolah bertahan di bawah angka 50. Ketiadaan fasilitas penunjang ini memaksa para pendidik di daerah terpencil untuk tetap menggunakan metode konvensional dan mengandalkan buku teks cetak secara total. Kondisi ruang kelas yang minim gawai ini membatasi ruang gerak siswa dalam mengeksplorasi literasi digital abad ke-21. Pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam mengurai benang kusut pembagian kuota bantuan sarana teknologi agar tidak menumpuk di wilayah urban yang secara mandiri sudah mapan secara finansial (Azzajjad & Ahmar, 2024; Nasori et al., 2024; Sari & Jasiah, 2025)

Kualitas dan retensi kompetensi tenaga pendidik di daerah terpencil juga menghadapi kendala serius yang memengaruhi keberlanjutan program pembaruan pengajaran. Meskipun program pelatihan rutin berhasil mencatatkan kenaikan keterampilan teknis guru sebesar 27, dampak intervensi tersebut cenderung menurun dalam jangka pendek. Lemahnya sistem pemantauan pasca-pelatihan menyebabkan para guru kembali menggunakan pola pengajaran tradisional di ruang kelas. Selain itu, beban kerja administrasi yang tinggi serta rasio perbandingan jumlah guru dan siswa yang mencapai angka 1 berbanding 40 memperparah kelelahan profesionalitas mengajar. Retensi kemahiran guru dalam mengoperasikan platform adaptif tidak akan bertahan lama tanpa adanya pendampingan intensif dari komunitas belajar lokal. Upaya peningkatan mutu guru harus digeser dari model lokakarya formal sekali selesai menjadi program pengondisian mandiri yang berbasis pada penyelesaian masalah riil di sekolah masing-masing (Pertiwi et al., 2025; Septaria et al., 2025; Wahyuni et al., 2024)

Dinamika aksesibilitas pendidikan luar kota juga diwarnai oleh fluktuasi angka partisipasi siswa yang berkejaran dengan tingginya risiko putus sekolah. Melalui intervensi bantuan sosial berupa program kartu indonesia pintar, angka keterlibatan belajar anak di daerah tertinggal memang mengalami kenaikan sebesar 15 hingga 20. Namun demikian, keberhasilan penyerapan peserta didik baru tersebut dibayangi oleh angka putus sekolah yang masih bertahan di rentang angka 10 hingga 15. Faktor kemiskinan struktural keluarga dan dorongan untuk memasuki pasar kerja usia dini menjadi pemicu utama anak meninggalkan bangku sekolah sebelum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Kebijakan afirmatif yang ada saat ini belum mampu sepenuhnya menyentuh akar permasalahan ekonomi sosiokultural yang dihadapi masyarakat marginal. Diperlukan intervensi berbasis data lokal yang akurat agar penyaluran dana bantuan pendidikan tepat sasaran dan mampu menahan laju penurunan jumlah siswa aktif (Fadillah et al., 2025; Nurcahya et al., 2024; Simanjuntak et al., 2024)





Secara komprehensif, evaluasi kebijakan ini memberikan implikasi teoretis mengenai pentingnya penerapan strategi pembelajaran campuran yang berbasis kearifan lokal untuk mereduksi ketimpangan sebesar 20 hingga 30. Penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian materi digital interaktif dapat menjadi solusi taktis untuk mengatasi keterbatasan pemahaman siswa di wilayah terpencil. Namun, keterbatasan utama penelitian ini terletak pada ketergantungan analisis pada data potong lintang, sehingga belum bisa memproyeksikan stabilitas kebijakan secara jangka panjang. Ruang lingkup pengamatan yang berfokus pada data makro juga berpotensi mengabaikan variasi kendala mikro yang unik di tiap sekolah dasar di pedalaman. Oleh karena itu, agenda riset mendatang direkomendasikan untuk menerapkan metode pemantauan berbasis data driven guna menghasilkan cetak biru transformasi inklusif yang berkeadilan sosial bagi seluruh anak bangsa.

KESIMPULAN

Analisis kebijakan pendidikan di Indonesia ini, poin utamanya adalah Kurikulum Merdeka memang udah jalan bagus di kota-kota besar dengan pembelajaran proyek yang fleksibel dan bikin siswa lebih mandiri, tapi di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih banyak hambatannya seperti infrastruktur minim, rasio guru-siswa timpang sampe 1:40, dan akses internet cuma di bawah 50%. Guru-guru di sana sering kesulitan adaptasi teknologi, masih pakai metode konvensional, fasilitas kurang, plus siswa butuh waktu buat kemandirian, kayak yang keliatan di studi SDN Namohalu Esiwa dan SMP swasta 3T tahun 2024-2026.

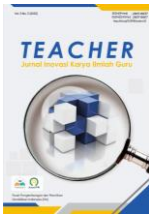
Makanya, solusinya harus komprehensif nih: kolaborasi lintas-sektor ala pentahelix bareng pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media, terus terapin blended learning yang disesuaikan sama bahasa daerah, pelatihan guru yang berkelanjutan biar skillnya nempel lama, sama bangun infrastruktur digital inklusif. Kalau ini digeber serius, ketimpangan pendidikan bisa turun 20-30% dalam 2-3 tahun ke depan, pasca-KMA 450/2024, dan bikin pendidikan lebih adil buat semua anak bangsa. Intinya, ini bukan cuma teori ribet doang, tapi rekomendasi praktis yang bisa langsung dipake pengambil kebijakan buat ningkatin mutu pendidikan secara merata dan bikin SDM Indonesia lebih kompetitif di era global sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggereini, E., Aina, M., Yelianti, U., & Muswita, M. (2025). Inovasi asesmen digital dalam pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka untuk guru-guru IPA. *Jurnal Widya Laksana*, 14(1). <https://doi.org/10.23887/jwl.v14i1.85951>
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpsektif pendidikan multikultural. *FOUNDASIA*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Azzajjad, M. F., & Ahmar, D. S. (2024). Pendampingan literasi melalui diseminasi kegiatan pengembangan media pembelajaran. *DISEMINASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 49–58. <https://doi.org/10.33803/diseminasiabdimas.v6i1.6454>
- Fadillah, L. J., Putri, A. M. N., Fauziah, H., Fajriansyah, R., Arpan, M., & Iqbal, N. M. (2025). Evaluasi kebijakan bantuan pendidikan (Program Indonesia Pintar/BOS) dalam mengatasi anak tidak sekolah dan peningkatan angka partisipasi kasar / angka partisipasi murni (APK/APM) di Indonesia. *Arus Jurnal Pendidikan*, 5(3), 429–436. <https://doi.org/10.57250/ajup.v5i3.2077>



- Fitri, W., Octaria, M., Irvanaries, Suwanny, N., Sisilia, S., & Firnando. (2020). Tantangan dan solusi terhadap ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai di tengah pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(10), 766–776. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.181>
- Hamidah, R. S. (2025). *Analisis problematika implementasi kurikulum pendidikan dasar di Indonesia tinjauan kebijakan, kesiapan guru, dan ketimpangan akses*. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17670466>
- Hamilaturroyya, H., & Adibah, I. Z. (2025). Dinamika pengembangan kurikulum di era digital dalam menjawab kesenjangan konsep dan praktik. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1245–1259. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6631>
- Herman, A., & Hayat, M. J. (2021). Management of high secondary education after regional government law. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*, 1(2). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i2.11>
- Hidayati, K., Tamrin, A. G., & Cahyono, B. T. (2024). Efektivitas penggunaan platform merdeka mengajar untuk peningkatan kompetensi guru pada kurikulum merdeka. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 6(1), 232–240. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.5765>
- Hunaepi, H., & Suharta, I. G. P. (2024). Transforming education in Indonesia: The impact and challenges of the Merdeka Belajar curriculum. *Path of Science*, 10(6), 5026–5039. <https://doi.org/10.22178/pos.105-31>
- Kristianti, T. (2022). Strategi penguatan literasi, numerasi dan teknologi di UPT SDN 84 Gresik. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1597–1604. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.7608>
- Nafahah, Z., & Ratnasari, F. D. (2025). Pengembangan bahan ajar digital berbasis project based learning (PjBL) untuk meningkatkan literasi sains siswa kelas X SMA pada materi energi terbarukan. *UPEJ (Unnes Physics Education Journal)*, 14(2), 223–240. <https://doi.org/10.15294/upej.v14i2.24550>
- Nasori, A., Aslindar, D., & Puspasari, E. (2024). The influence of the Free Curriculum and technology-based learning media on digital literacy. *Jurnal Simki Pedagogia*, 7(1), 284–295. <https://doi.org/10.29407/jsp.v7i1.603>
- Nurasiah, I., Marini, A., Nafiah, M., & Rachmawati, N. (2022). Nilai kearifan lokal: Proyek paradigma baru program sekolah penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3639–3648. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2727>
- Nurchahya, A., Qurtubi, A., & Fauzi, A. (2024). Kebijakan pendidikan dasar (wajib belajar sembilan tahun). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12(1), 83–105. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v12i1.4707>
- Nurhanifah, I., Almadani, M. S., Maulida, N., Fatimah, S., & Pratiwi, D. A. (2025). Langkah nyata menuju pendidikan berkualitas dalam transformasi kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka di SDN Belitung Selatan 4. *MASALIQ*, 5(3), 1037–1050. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v5i3.5661>
- Pertiwi, F., Siregar, H., & Maysara, S. R. (2025). Implementasi pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal di PAUD-nonformal: Studi fenomenologi. *Jurnal Obsesi:*



Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 9(6), 2691–2704.

<https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i6.7563>

Ridwan, A., & Sakdiyah, H. (2022). Analisis sumber dana pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor. *Jurnal Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 4(1), 19–27.

<https://doi.org/10.47662/hibrululama.v4i1.168>

Sari, T. N., & Jasiah, J. (2025). Membangun pendidikan berkeadilan: Mengatasi masalah pemerataan pendidikan antara daerah dan perkotaan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1723–1731. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7661>

Septaria, K., Fatharani, A., Sholihin, M., Kholiq, A., Zamroni, M. R., Hendratmoko, A. F., Hayati, E., Azizah, L. N., & Leksana, D. M. (2025). Peningkatan kualitas guru melalui komunitas: Pelatihan dan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran untuk mendukung SDGs-4. *Jurnal Abdimas Terapan*, 4(2), 76–89.

<https://doi.org/10.56190/jat.v4i2.84>

Simanjuntak, P. N., S, B. S. Y., Simangunsong, M., & Berlianti, B. (2024). Ketimpangan distribusi Kartu Indonesia Pintar: Sebuah kajian terhadap akses dan implementasi di Indonesia. *AHKAM*, 3(4), 803–812. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i4.4251>

Sulastri, S., Fitria, H., & Martha, A. (2020). Kompetensi profesional guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Journal of Education Research*, 1(3), 258–264.

<https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.30>

Susanto, A., Pebriani, R. D., Zahra, S., & Azhar, S. (2025). Mengenal guru menuju profesional. *Indonesian Journal of Education*, 2(1), 441–446.

<https://doi.org/10.71417/ije.v2i1.624>

Wahyuni, R., Ernawatie, E., Berliani, T., Nugroho, P. J., Purnomo, W., Radiafilan, C., & Febriyanti, L. (2024). Pendampingan penyusunan aksi nyata pelatihan mandiri pada platform merdeka mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru di sekolah. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(11). <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i11.7912>

Yarun, A., Bakar, M. Y. A., & Kholis, N. (2023). Assessing the preparedness of Islamic religious education teachers in Indonesia for technology-based learning innovations. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 91–105.

<https://doi.org/10.30659/jpai.6.2.91-105>

Yuniastuti, H., Syahrirra, N., Rusma, S. M., & Andriani, O. (2023). Dampak pergantian kurikulum pendidikan terhadap peserta didik sekolah dasar. *TSAQOFAH*, 3(6), 1165–1179. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i6.1788>

Zamhari, Z., Noviani, D., & Zainuddin, Z. (2023). Perkembangan pendidikan di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 1(5), 1–10.

<https://doi.org/10.61132/morfologi.v1i5.42>